

MODEL KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA (Studi Kasus pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta)

Najib

Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Indonesia
najibriau@gmail.com

Abstract

This research aims to find the right communication model and apply it to the leadership of the Inter-Agency Relations sub-sector in the Riau Provincial Government Liaison Agency in Jakarta. The theory used is leadership theory in general and leadership communication in organizations in particular. Researchers used qualitative methods with a case study approach and data collection techniques through interviews with leaders as decision or policy makers as well as staff in the sub-sector of Inter-Institutional Relations in the Riau Provincial Government Liaison Agency as well as using observation methods on existing reports. The result of this research is the discovery of a communication model that is relevant to be applied to leadership in the sub-field of Inter-Institutional Relations, namely a democratic communication model with a participatory approach. The conclusion of this research is that leadership in an organization should involve staff before making decisions or policies. The success of leadership is determined by internal success first.

Keywords:

Decision or Policy
Communication
Leadership

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model komunikasi yang tepat dan diterapkan pada kepemimpinan sub bidang Hubungan Antar Lembaga dalam Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau yang ada di Jakarta. Teori yang digunakan adalah teori kepemimpinan secara umum dan komunikasi kepemimpinan dalam organisasi secara khusus. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pimpinan sebagai pengambil keputusan atau kebijakan serta staf pada sub bidang Hubungan Antar Lembaga dalam Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau juga dengan metode observasi terhadap laporan-laporan yang sudah ada. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya model komunikasi yang relevan untuk diterapkan pada kepemimpinan sub bidang Hubungan Antar Lembaga yaitu model komunikasi demokratis dengan pendekatan partisipatif. Kesimpulan pada penelitian ini adalah kepemimpinan pada organisasi seyogyanya melibatkan para staf sebelum mengambil keputusan atau kebijakan, keberhasilan kepemimpinan itu ditentukan oleh keberhasilan internal terlebih dahulu.

Corresponding Author:

Najib
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
najibriau@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Berbicara tentang kepemimpinan, salah satu unsur penting yang harus ada di dalamnya ialah komunikasi. Komunikasi kepemimpinan merupakan salah satu unsur kunci yang

memengaruhi efektivitas seorang pemimpin, Seorang pemimpin harus dapat mengkomunikasikan visi, misi, dan tujuan organisasi dengan jelas kepada timnya. Komunikasi yang baik membantu memastikan bahwa semua anggota tim memahami arah yang diinginkan dan bekerja menuju tujuan bersama. Melalui komunikasi yang baik, seorang pemimpin dapat memotivasi timnya.

Handayani (1996) dalam jurnal Taufiq et al. (2020) mengemukakan bahwa: “kepemimpinan merupakan kecakapan untuk meyakinkan orang-orang agar mengusahakan secara tegas tujuan-tujuannya dengan penuh semangat”. Pemimpin yang memiliki keterampilan komunikasi yang kuat sering dianggap sebagai pemimpin yang efektif, karena mereka mampu mengartikulasikan visi organisasi dengan jelas kepada para pengikutnya. Stephan and Pace (2002) dalam jurnal Mustaghfiroh et al. (2021) berpandangan kepemimpinan yang efektif memiliki dasar filosofis yang mencakup kebesaran jiwa manusia, ketekunan, dan kegigihan dalam mengoptimalkan potensi individu. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika kerja dalam organisasi untuk dapat berkomunikasi dengan efektif dan menyampaikan tujuan organisasi dengan tepat.

Organisasi atau Lembaga Pemerintahan adalah entitas yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur berbagai aspek kehidupan dalam suatu negara atau wilayah tertentu, dan salah satu wilayah yang menjadi objek kajian adalah Pemerintah Provinsi Riau, yang merupakan bagian penting dari struktur pemerintahan di Indonesia. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Provinsi ini terletak di Pulau Sumatera dan memiliki berbagai kekayaan alam yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Daerah yang mayoritas masyarakatnya adalah Melayu ini kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi dan gas alam. Terdapat banyak ladang minyak dan gas di wilayah ini, yang menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah dan industri energi di Indonesia.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 Provinsi Riau tercatat menghasilkan minyak bumi mencapai lebih dari 365 ribu barel per hari. Nilai ekspor hasil minyak dari Riau proporsinya juga mencapai 29,36% dari nilai total ekspor nasional. Selain minyak bumi dan gas alam, Riau juga memiliki fasilitas industri petrokimia yang penting. Kontribusi Provinsi Riau terhadap nasional khususnya melalui Sumber Daya Alam (SDA) cukup signifikan. Namun, dalam konteks anggaran, terlihat bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Riau pada tahun 2022 masih berada pada tingkat yang tergolong rendah. Dari 12 kabupaten/kota yang ada, hanya separuhnya, atau 6 kabupaten/kota, yang dapat mengklaim pencapaian yang memuaskan dalam hal APBD. Selain itu, APBD Provinsi Riau untuk tahun 2022 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2021. Bahkan beberapa tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2016, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Riau berada pada tingkat terendah di seluruh Indonesia, yaitu hanya mencapai 59,6%. Permasalahan di atas tentunya menjadi salah satu pekerjaan rumah yang penting bagi pemerintah Provinsi Riau sebagai garda terdepan dalam ranah pemerintahan ataupun lembaga administratif serta bertanggungjawab penuh bagi masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Oleh karena itu, organisasi-organisasi perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya serta bertanggungjawab penuh dengan Kepala Daerah. Salah satu lembaga yang mengemban amanah tersebut adalah Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau yang berada di Jakarta.

Badan Penghubung Provinsi adalah salah satu Badan Daerah yang dimasukkan ke dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi di mana tertuang dalam nomenklatur OPD Provinsi. Dalam pasal 24 ayat (7) PP No. 18 Tahun 2016 dijelaskan bahwa “untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dapat membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di Ibu Kota Negara”. Berlanjut pada ayat (8) PP No. 18 Tahun 2016 yaitu “Pembentukan Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau (BP3R) merupakan salah satu lembaga setingkat Dinas Provinsi yang memiliki peran kunci dalam menjembatani komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. BP3R bertanggung jawab secara langsung kepada Gubernur Provinsi Riau melalui Sekretaris Daerah. Pegawai yang bertugas di kantor BP3R berperan sebagai duta daerah, diberikan amanah untuk menjembatani berbagai urusan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat secara spesifik dan lembaga-lembaga lainnya secara umum.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan studi kasus guna mengeksplorasi isu atau permasalahan yang terjadi pada sub bidang Hubungan Antar Lembaga dalam Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau yang ada di Jakarta yaitu terkait tumpang tindih program sub bidang Hubungan Antar Lembaga dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau serta belum adanya kesepahaman antar Pemerintahan Kab/Kota di Provinsi Riau dengan tugas, pokok dan fungsi dari Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau.

Data diperoleh melalui 2 cara yaitu sumber data primer dan sumber data skunder pada penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan yaitu melalui wawancara dengan Pimpinan lembaga Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu Yogyakarta dan observasi. Selain itu, data diambil dari bahan buku-buku bacaan, dokumen- dokumen atau literatur pendukung lainnya yang ada di lembaga Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, kemudian melakukan observasi dengan mengamati subjek yang diteliti.

A. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta, apabila data tersebut diolah maka akan menghasilkan suatu informasi. teknik pengumpulan data yang hendak diterapkan penulis meliputi:

- 1) Wawancara, metode wawancara (interview) adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicara mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Wawancara dilakukan secara mendalam atau indepth interview untuk dapat memenuhi dan mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian wawancara dilakukan dengan Boy Surya Gautama selaku Kepala sub bidang Hubungan Antar Lembaga di lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau serta Adi Utama dan Yulianto Darwan sebagai staf sub bidang Hubungan Antar Lembaga yang telah lama bekerja serta mengalami beberapa kali pergantian Kepala sub bidang Hubungan Antar Lembaga.
- 2) Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Nasution, 1988). Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sanafiah Faisal (1990) mengklasifikasikan salah satu jenis observasi yaitu observasi berpartisipasi. Pada observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti ikut sebagai peserta rapat atau kegiatan yang sedang berlangsung dilingkungan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau, sementara itu dalam observasi non partisipatif peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, peneliti hanya berperan mengamati kegiatan dan tidak ikut serta di dalamnya. Melalui teknik observasi ini peneliti dapat melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian serta mengamati kondisi yang terjadi.
- 3) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono dan Lestari, 2021). Dokumentasi merupakan salah satu upaya untuk mendukung dan

menunjukkan kepercayaan atau kredibilitas dari hasil wawancara dan juga observasi. Peneliti mengumpulkan dokumentasi publik seperti informasi yang tercantum di media massa, publikasi, media online maupun artikel lainnya tentang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Media online yang digunakan adalah <https://badanpenghubung.riau.go.id/> yang merupakan website resmi dari Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau yang memuat berbagai macam kegiatan-kegiatan Hubungan Antar Lembaga.

B. Metode Analisis Data

Metode olah data dan analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam handout metode penelitian Rinduan Zain (2022) adalah dengan menggunakan empat langkah sebagai berikut, yaitu: Transcript, coding, grouping, comparing dan contrasting.

- a) Transcript, yaitu proses olah data yang dilakukan dengan cara mengetik secara apa adanya berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Data yang diketik berupa jawaban dan pertanyaan-pertanyaan dari subjek penelitian.
- b) Coding, proses ini dilakukan setelah melakukan transcript yaitu memberikan label pada jawaban informan. Maksudnya dari jawaban yang diberikan oleh informan diberikan label sesuai variabel.
- c) Grouping, yaitu mengelompokkan atau mengklarifikasi data dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di lapangan untuk disamakan antara label yang satu dengan label yang lain sehingga memudahkan untuk analisa data.
- d) Comparing dan Contrasting, setelah melakukan grouping proses selanjutnya yaitu mencari persamaan dan perbedaan dari jawaban informan. Pada proses ini, peneliti memasukkan opini yang didasarkan pada data yang telah diperoleh melalui wawancara dan menarasikan persamaan dan perbedaannya. Setelah menarasikan persamaan dan perbedaan dari jawaban informan, maka selanjutnya peneliti membandingkan hasil dari narasi dengan mengacu pada telaah pustaka yang telah peneliti review sebelumnya.

C. Keabsahan Data

Berkaitan dengan proses pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji data tentang model komunikasi kepemimpinan, maka pengumpulan dan pengujian data yang diperoleh dapat dilakukan ke akademisi, lembaga yang terkait dengan sub bidang hubungan antar lembaga dan masyarakat yang mendapat layanan dari sub bidang hubungan antar lembaga.

Triangulator pada penelitian ini adalah Achmad Isya Alfassa, informan ini pernah bekerja di lembaga pemerintahan yaitu Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Saat ini informan aktif sebagai Dosen Statistika di salah satu Universitas Swasta yang ada di Provinsi Riau. Triangulator selanjutnya adalah Gusratih Andriani salah satu Masyarakat Riau yang ada di Pulau Jawa dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa aktif program Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan di Universitas Gadjah Mada. Data dari triangulator tersebut, tidak bisa di rata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (membercheck) dengan tiga sumber data tersebut.

Bagian metode menggambarkan langkah-langkah yang dilalui dalam mengeksekusi penelitian/kajian. Oleh karena itu, perlu ditampilkan secara detail kepada pembaca (reader) mengapa metode yang digunakan reliabel dan valid dalam menyajikan temuan penelitian/kajian. Bagian metode penelitian harus dapat menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk bagaimana prosedur pelaksanaannya, penjelasan alat, bahan, media atau instrumen yang digunakan, penjelasan rancangan penelitian, populasi dan sampel (sasaran penelitian), teknik pengumpulan data, pengembangan instrumen, dan teknik analisis data. Penulisan sub judul pada metode hendaknya dimasukkan ke dalam paragraf bukan bullets, atau numbering. Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian.

3. PEMBAHASAN

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau (BP3R) adalah organisasi yang dibentuk sebagai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta. BP3R sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seyogianya memiliki lokasi yang cukup strategis yaitu Ibu Kota Negara untuk melakukan penyampaian informasi, fasilitasi, koordinasi serta diplomasi mengenai kepentingan-kepentingan Pemerintah Provinsi Riau seperti peningkatan ekonomi, pemerataan pembangunan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), pengembangan kebudayaan dan lain sebagainya. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Riau yang ada di Jakarta dan secara umum di Pulau Jawa. Kehadiran Badan ini menjadi ujung tombak atau barisan depan bagi pemerintah Provinsi Riau untuk menyediakan informasi teknis dan non-teknis terkait dengan potensi dan sumber daya yang ada di Provinsi Riau.

- 1) Karakteristik Kepemimpinan di Sub bidang Hubungan Antar Lembaga
 - a. Boy Surya Gautama (Kasubbid HAL periode 2017-2019), Boy Surya Gautama kembali dipercaya menjadi Kasubbid Hubungan Antar Lembaga setelah sebelumnya pada periode 2017 – 2019 menjabat sebagai Kasubbid Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat untuk pertama kalinya. Pada periode 2017-2019 Boy Surya Gautama atau yang akrab dikenal Pak Boy ini adalah sosok yang pemimpin yang empati, sebagai sosok pimpinan sub bidang ia dikenal dekat dengan para staf yang menjadi anggotanya. Yulianto Darmawan, sebagai staf yang sudah cukup lama mengabdikan di sub bidang HAL menuturkan bahwa karakter pemimpin yang pas untuk saat ini yaitu pada sosok Kepala sub bidang Hubungan Antar Lembaga yang sekarang, yaitu Boy Surya Gautama. Meskipun baru merasakan di bawah kepemimpinan Boy Surya Gautama, ia merasa cocok dengan kinerjanya sebagai Kasubbid.
 - b. Decy (Kasubbid HAL periode 2019 - 2021), Decy adalah salah satu kepala sub bidang HAL yang dikenal cukup tegas dengan suara melengkingnya, juga dengan jiwa keibumannya. Karakter ini yang kemudian membuat salah satu informan peneliti menyebut di bawah kepemimpinan Decy ini enak, akan tetapi ia terkadang lupa bahwa staf yang ada dalam sub bidang Hubungan Antar Lembaga ini bukan hanya satu orang saja. Yulianto Darwaman atau yang akrab di sapa Iwan menyatakan bahwa karakter Decy ini apabila sudah cocok bekerja dengan satu orang staf maka staf tersebut selalu menjadi prioritas dan dilibatkan dalam berbagai hal. Padahal jumlah staf sub bidang HAL ini ada 9 orang.
 - c. Dina Febrianti (Kasubbid HAL periode 2021 - 2023), Dina Febrianti memulai tugasnya sebagai Kepala sub bidang HAL setelah menggantikan Decy yang naik jabatan menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU). Dina Febrianti yang akrab dipanggil Dina ini dikenal sebagai Kasubbid HAL yang cukup sewenang-

wenang. Informan peneliti, Yulianto Darmawan sebagai salah satu staf sub bidang HAL yang sudah lama bekerja di sub bidang Hubungan Antar Lembaga serta merasakan beberapa kali periode kepemimpinan yang berbeda menyebut bahwa pada periode Kasubbid HAL di pimpin oleh Dina Febrianti cukup otoriter. Lebih lanjut dalam wawancara Yulianto Darmawan menyebut bahwa Dina Febrianti (Kasubbid HAL) sebelumnya menganggap para staf tidak bisa bekerja. Kepala sub bidang ini menganggap dirinya bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari para staf. Pengalamannya bekerja bertahun-tahun di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menjadi alasannya. Singkatnya, perihal pembuatan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) saja ia sambil menutup mata bisa terselesaikan, jelas Yulianto Darmawan. Sikap dan anggapan Dina Febrianti selaku Kasubbid membuat para staf hanya datang dan duduk saja di dalam ruangan. Para staf meminta pekerjaan tetapi tidak pekerjaan yang diberikan. Lebih parahnya lagi, Dina Febrianti menyimpulkan dan menyampaikan kepada pegawai atau karyawan lain bahwa para stafnya tidak mau bekerja dan perihal ini berlangsung selama kurang lebih 2 Tahun, ungkap Yulianto Darmawan.

2) Komunikasi Kepemimpinan di Sub bidang Hubungan Antar Lembaga

Karakter kepemimpinan pada sub bidang Hubungan Antar Lembaga cukup bervariasi atau beragam yang sudah dirasakan oleh Adi Utama sebagai orang yang juga sudah cukup lama bekerja seperti Yulianto Darmawan di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau secara khusus pada sub bidang HAL. Menurut Adi Utama perbandingan kepemimpinan yang struktural dengan otoriter beda tipis, berbagai versi kepemimpinan yang pernah ia alami. Pada periode ini, menurutnya model komunikasi kepemimpinan yang ditampilkan oleh Kasubbid HAL cenderung ke arah diskusi, setiap ada permasalahan apa pun itu selalu di komunikasikan. Jadi, jika ada arahan dari atasan (Kepala Badan), atasan lalu ke Kasubbid HAL, Kasubbid HAL pun langsung ke para staf seandainya ada hal-hal yang perlu dibicarakan di diskusikan bersama-sama, perlu segera di selesaikan, jelas Adi Utama. Adi Utama bersyukur Kasubbid yang menjabat saat ini bisa diajak berkolaborasi untuk menemukan solusi bersama-sama.

Keputusan yang di ambil secara bersama-sama atau melalui diskusi dengan staf tampaknya menjadi salah satu ciri khas yang dilakukan oleh Boy Surya Gautama dalam memimpin sub bidang Hubungan Antar Lembaga. Model komunikasi ini kemudian menjadi pembeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Adi Utama. Karakteristik yang ditampilkan oleh Boy Surya Gautama sebagai kepala sub bidang Hubungan Antar Lembaga memberikan energi yang berbeda bagi staf-staf sub bidang HAL, salah satunya yang dirasakan oleh Adi Utama.

3) Komunikasi Kepemimpinan Antar Lembaga pada Sub bidang Hubungan Antar Lembaga

Tugas pokok dan fungsi dari sub bidang HAL yang secara umum adalah memfasilitasi dan disebut sebagai ujung tombak bagi lembaga atau organisasi di Provinsi Riau yang memiliki kepentingan di wilayah pusat secara jelas dijalankan dengan baik berupa kemasyarakatan, mahasiswa, sosial bahkan pelayan kesehatan. Tupoksi sub bidang Hubungan Antar Lembaga dalam hal pelayan kesehatan pernah berada pada fase yang baik, di mana adanya kerjasama antara BP3R dengan Dinas Kesehatan Provinsi.

Bermula dari adanya nota kesepahaman antara BP3R dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Adi Utama menjelaskan “Jadi awalnya itu nota dinas. Awalnya nota dinas kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan BP3R melalui kemasyarakatan bidang kemasyarakatan”. Kesepakatan itu dimulai melalui Dokter Erna yang bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Riau. dr. Erna membuka jalur lalu mengelola serta mengurus terkait program pelayanan kesehatan ini. Beliau sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan kepada Badan

Penghubung baik berupa Jamkesda maupun Jamkesmas. Misalnya Dinas Kesehatan mendistribusikan barang ataupun lainnya ke Badan Penghubung. Namun, seiring berjalannya waktu, kerjasama tersebut hanya berjalan sebentar karena adanya perubahan anggaran dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Pada proses realisasi program pelayanan kesehatan saat masih bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, sub bidang HAL selalu melakukan koordinasi, sebagai lembaga yang juga memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pelayanan kesehatan juga selalu membuka komunikasi apabila dimintai keterangan agar penyaluran anggaran kesehatan ini tidak terjadi dua kali. Misalnya, apabila seorang pasien sudah pernah dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi maka dalam kurun waktu 2 bulan kemudianlah baru sub bidang HAL memberikan bantuan kembali.

Permasalahan yang dihadapi oleh sub bidang HAL sejak dulu hingga kini adalah tidak adanya rumah singgah untuk masyarakat Riau, hal ini juga tertera dalam Laporan Kinerja Pemerintah. Meskipun demikian, sub bidang HAL selalu mengupayakan dan memastikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pasien yang dirujuk ke Indonesia beserta keluarga yang mendampingi. Kerja sama antar BP3R melalui sub bidang Hubungan Antar Lembaga dengan Dinas Kesehatan seyogianya bisa direalisasikan kembali. Namun, semua itu tergantung dari keputusan dan kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan melalui upaya rasionalisasi anggaran. Akan tetapi upaya ini juga akan menjadi sia-sia apabila tidak ada inisiatif dari pimpinan karena alasan eselon.

4) Komunikasi Birokrasi di Sub bidang Hubungan Antar Lembaga

Sub bidang Hubungan Antar Lembaga di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau memiliki peran krusial sebagai penghubung antara Pemerintah Daerah (baik tingkat Kabupaten/Kota) dengan Pemerintah Pusat. Sejak awal, lembaga ini bertindak sebagai mediator atau perantara dalam mengurus masalah-masalah yang terkait dengan Pemerintah Pusat. Pentingnya peran ini semakin terangkat, terutama selama pandemi. Instruksi dari Kementerian Dalam Negeri yang mewajibkan Pemerintah Daerah yang memiliki urusan dengan Pemerintah Pusat untuk berkoordinasi melalui Badan Penghubung Provinsi menunjukkan kebutuhan akan koordinasi yang lebih ketat dalam situasi darurat seperti pandemi.

Sub bidang Hubungan Antar Lembaga di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau harus memiliki sistem komunikasi yang efektif dan efisien untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ini mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan tepat, memfasilitasi aliran informasi yang akurat dan tepat waktu, serta menjaga hubungan baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Selain itu, dalam situasi darurat seperti pandemi, peran Badan Penghubung Provinsi menjadi lebih vital dalam menyampaikan informasi yang relevan, mengkoordinasikan respons, dan memfasilitasi pertukaran informasi yang diperlukan antara tingkat Pusat dan Daerah untuk menangani situasi krisis dengan lebih baik.

Pandemi COVID-19 telah menciptakan perubahan besar dalam dinamika organisasi pemerintahan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perubahan kebijakan yang cepat dan sering terjadi memunculkan kebutuhan akan koordinasi yang lebih efisien dan efektif di antara berbagai tingkatan pemerintahan. Badan Penghubung, seperti yang ada di Provinsi Riau, menjadi semakin vital dalam konteks ini. Dalam kondisi di mana kecepatan dan ketepatan dalam menyampaikan informasi menjadi kunci, Badan Penghubung berperan sebagai jembatan utama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Mereka tidak hanya menyediakan saluran komunikasi yang efisien, tetapi juga mempercepat aliran informasi yang relevan terkait kebijakan, pedoman, atau instruksi yang harus disampaikan dari pusat ke daerah, dan sebaliknya.

Komunikasi dan organisasi merupakan konsep yang inheren, Katherin Miller dalam bukunya *Organization Communication (Approaches and Processes)* Sixth Edition pada hal 188-192

menyatakan bahwa dinamika dalam organisasi melibatkan proses komunikasi yang kompleks di antara berbagai konstituen di dalam dan di sekitar organisasi. Misalnya, ia menemukan bahwa sangat penting bahwa beragam peserta organisasi diberitahu tentang perubahan tersebut dan merasa bahwa mereka bagian dari proses pengambilan keputusan. Hal demikian yang semestinya diterapkan pada sub bidang Hubungan Antar Lembaga, Boya Surya Gautama sebagai kepala sub bidang melibatkan para staf sub bidang HAL.

Namun, penting juga bahwa manajemen dalam suatu organisasi dipandang memahami dengan jelas masalah-masalah organisasi, mendukung upaya perubahan yang tepat, dan siap menghadapinya. Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam organisasi proses perubahan. Peran komunikasi dalam kepemimpinan organisasi begitu penting dan peran ini juga dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Misalnya, penting untuk melihat pesan yang disampaikan atau dalam kata lain apa yang dikatakan. Tentu saja isi komunikasi yang akan timbul berbeda-beda dari situasi ke situasi, dalam hal ini beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pemimpin yang menggunakan konten "visioner" dalam komunikasi mereka lebih efektif dibandingkan mereka yang menggunakan konten yang lebih pragmatis (Awamleh&Gardner, 1999; Holladay& Coombs,1993).

Pada proses komunikasi yang telah peneliti himpun dari wawancara serta observasi di lapangan, terdapat beberapa model komunikasi yang terjadi pada sub bidang Hubungan Antar Lembaga selama 4-5 tahun terakhir. Secara umum, keberlangsungan roda organisasi pada sub bidang HAL dipengaruhi oleh siapa yang menjadi Kasubbid atau pimpinan pada sub bidang tersebut. Misalnya pada periode Kasubbid Decy, dari hasil penelitian Decy disebut sebagai Kasubbid yang hanya mengandalkan satu atau dua orang staf saja. Staf yang ia rasa cocok dan baik menurutnya.

Pemimpin yang memilih-milih atau pilih kasih terhadap stafnya sering kali dianggap sebagai pemimpin yang tidak adil atau tidak objektif. Istilah yang sering digunakan untuk pemimpin seperti ini adalah "nepotisme" atau "pilih kasih". Nepotisme mengacu pada perlakuan yang tidak adil di mana pemimpin lebih condong untuk memberikan kesempatan atau perlakuan istimewa kepada orang-orang tertentu berdasarkan hubungan pribadi atau faktor-faktor non-profesional, bukan berdasarkan kinerja atau kualifikasi yang seharusnya menjadi pertimbangan utama. Hal ini dapat merugikan moral dan produktivitas staf serta berpotensi menciptakan ketidakpuasan di lingkungan kerja.

Selanjutnya sub bidang HAL di bawah kepemimpinan Dina Febrianti, dari hasil penelitian yang ditemukan Dina Febrianti dikenal sebagai sosok pimpinan yang otoriter dan juga individualis, mengerjakan segala sesuatunya sendiri serta tidak banyak melibatkan para dalam segala keputusan dan kebijakan. Pemimpin semacam ini sering kali disebut sebagai "otokratis" atau "otokratik". Istilah ini merujuk pada gaya kepemimpinan di mana pemimpin cenderung mengambil semua keputusan sendiri, menangani semua tugas atau tanggung jawab tanpa melibatkan anggota tim atau bawahan. Mereka sering kali enggan untuk memberdayakan anggota tim atau merasa bahwa hanya mereka yang bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Karakteristik ini bisa mengakibatkan beberapa masalah di lingkungan kerja, termasuk kurangnya keterlibatan tim, kurangnya perkembangan keterampilan anggota tim, serta perasaan kurang dihargai dan kurangnya motivasi. Pemimpin otkratis cenderung mengendalikan semua aspek, yang bisa menjadi hambatan besar bagi perkembangan tim dan organisasi secara keseluruhan.

Pada periode saat ini, Kasubbid HAL dipimpin oleh Boy Surya Gautama. Bagi Boy Surya Gautama, jabatan ini tidak mengejutkan baginya karena pada tahun 2017-2019 Boy Surya Gautama menjadi Kasubbid HAL sebelum akhirnya digantikan oleh Decy yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Namun, bagi Boy Surya Gautama tentu ada beberapa hal yang berbeda termasuk nomenklatur mengenai nama sub bidang HAL itu sendiri yang berpengaruh terhadap batas dan jangkauan dalam pelaksanaan-pelaksanaan program kerja. Selain itu, ia berada di bawah kepemimpinan Kepala Badan yang berbeda dari sebelumnya. Komunikasi organisasi yang dilakukan oleh sub bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau seperti yang dijelaskan oleh R. Wayne Pace dan Don F.

Faules dalam bukunya Komunikasi Organisasi pada halaman 185 yaitu komunikasi terdiri dari tiga level, di antaranya komunikasi atas ke bawah (top-down), komunikasi bawah ke atas (bottom-up) dan komunikasi secara horizontal telah diterapkan oleh kepala sub bidang Hubungan Antar Lembaga yang saat ini sedang menjabat. Sebagaimana yang telah peneliti uraikan pada hasil penelitian di atas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Peneliti memperoleh kesimpulan tentang Model Komunikasi Kepemimpinan pada sub bidang Hubungan Antar Lembaga dalam Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta yaitu Model Komunikasi Demokratis dengan Pendekatan Persuasif diterapkan pada sub bidang Hubungan Antar Lembaga yang dilakukan oleh Kepala Sub bidang sebagai Pimpinan sebelum mengambil keputusan atau kebijakan, sebab keberhasilan kepemimpinan itu ditentukan oleh keberhasilan internal terlebih dahulu. Komunikasi Top Down, Komunikasi BottomUp serta Komunikasi Horizontal juga berdampak positif dalam komunikasi antar lembaga pada pemerintahan Provinsi Riau. Alur informasi yang terukur dapat membantu mengurangi adanya disinformasi sehingga pelaksanaan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Sub bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai salah satu bagian dari Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau yang menjadi ujung tombak bagi Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta dapat menjalankan tugasnya dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat baik melalui surat, media maupun face to face. Peran dari sub bidang Hubungan Antar Lembaga semakin penting pasca pandemi COVID-19 serta adanya aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan pemerintah daerah baik tingkat I maupun II dapat melalui Badan Penghubung Pemerintah Provinsi terlebih dahulu. Komunikasi Kepimpinan yang baik akan memberikan keputusan atau kebijakan yang baik pula, pada program-program sub bidang Hubungan Antar Lembaga tidak akan ditemui lagi istilah tumpang tindih program dengan Lembaga atau Dinas Provinsi lainnya, seperti halnya program pelayanan kesehatan sub bidang Hubungan Antar Lembaga dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

4.2 Saran/Rekomendasi

Sub bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai salah satu unsur penting dalam Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki tugas menjadi jembatan penghubung, perantara, bahkan ujung tombak bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam menunjang pembangunan daerah sudah seharusnya memiliki komunikasi yang baik, utamanya komunikasi secara internal sebelum menyelesaikan permasalahan eksternal yang ada. Peneliti memberikan saran yakni bagi sub bidang Hubungan Antar Lembaga untuk menjaga komunikasi dan saling terbuka dalam hal informasi utamanya antara Kasubbid dengan para staf. Keputusan atau kebijakan yang diambil dari sub bidang Hubungan Antar Lembaga membutuhkan diskusi, saling memberi masukan sehingga memunculkan banyak ide maupun gagasan. Kolaborasi antar Kasubbid dan para staf juga dapat menghadirkan situasi organisasi yang baik dan terbuka.

Komunikasi antar sub bidang yang ada pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta juga penting, sehingga kolaborasi program-program pun dapat dilaksanakan, sehingga tidak monoton pada sub bidang tertentu. Selain itu, peran dari Kepala Badan juga penting dalam memastikan bahwa situasi tiap sub bidang yang ada di Badan Penghubung berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan organisasi dapat tercapai. Karena bagaimanapun, orang-orang yang berada pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau adalah orang-orang pilihan daripada Gubernur Provinsi Riau dan menjadi ujung tombak bagi pembangunan Provinsi Riau di Ibu Kota Negara. Gubernur Riau sebagai Kepala Pemerintahan tertinggi di Provinsi Riau senantiasa bekerja sama dengan Kepala Badan untuk menilai, mengevaluasi kinerja para staf pemerintahan yang bertugas di Kantor Perwakilan Daerah ini yang ada di Jakarta, karena para staf tersebut merupakan orang-orang kepercayaan Gubernur. Selain itu, hendaknya para staf khususnya kepala sub bidang untuk memaksimalkan kinerja dan tugas yang diemban serta berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang terkait.

REFERENSI

- Aisyah, N. (2020). 360-Degree Leadership. *Computerworld*, 39(1), 1–11.
- Ayep, A., Fikri, M., Malik Zulkarnain, A., & Fauzi, A. (2023). Kepemimpinan dan Komunikasi (Suatu Kajian Literatur Review Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 315–323. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1434>
- Bass, B. M. (2006). Transformasional Leadership. In *Paper Knowledge .Toward a Media History of Documents*.
- Communication, M. (2017). *Leadership Communication at Middelfart Sparekasse*.
- Daniel Goleman, Richard Boyatzis, A. M. (2013). *Primal leadership: Unleashing the power of emotional intelligence*.
- Fadillah, M., & Baharun, M. (2022). Model Komunikasi Kelompok Pada Organisasi English Lover Santri. *Jurnal Komunikasi & Konseling Islam*, 4(2), 107–112.
- Handiman, U. T., Faridi, A., Prasetya, A. B., Hasibuan, A., Ismail, M., Dharma, E., Purba, S., Hidayatulloh, A. N., Purba, B., & Mustapa, J. (2022). Komunikasi dan Kepemimpinan Organisasi (Issue August).
- Hati, C. P., Anggraini, C., & Ubalaga, L. M. (2023). Employee Engagement: Menelaah Model Komunikasi Dan Budaya Organisasi Bpjs Ketenagakerjaan. *Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJ DPR)*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.25124/ijdp.v2i1.5516>
- Indra, D., & Toni, A. (2022). Efektivitas Komunikasi Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan dalam Skema Kerja Work from Home. *CARAKA : Indonesia Journal of Communication*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.25008/caraka.v3i1.43>
- Kouzes, J., & Posner, B. (2017). Leadership challenge. *Airline Business*, 32(3), 426. https://doi.org/10.1057/9781137488145_3
- Miller, K. (2012). *Organizational Communication (Approaches and Processes) (Sixth)*. Lyn Uhl.
- Muftitama, A. (2020). Strategi Komunikasi Kepemimpinan & Manajemen Konflik dengan Konsep LCCVASE (Listening, Clarifying, Confirming, Verifying, Action-Solving, Evaluating). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2(2), 1–31. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.31>
- Mustaghfiroh, M., Mustiningsih, M., & Sumarsono, R. B. (2021). Gaya Komunikasi Kepemimpinan Kepala Sekolah Perempuan. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 6(5), 787. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v6i5.14849>
- Purbaningrum, D., Alfiah Chusjairi, J., & Sudarmanti, R. (2023). Komunikasi Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Organisasi Komunitas Perempuan Tangguh Nasional. 6, 1966–1975.
- Rafiku Rahman. (2023). Konsep Komunikasi Kepemimpinan Era Digital. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v9i1.1927>
- Roskiana, S., & Haris, I. (2020). *Sitti-Roskina-Mas-Buku-Komunikasi-Dalam-Organisasi-Teori-dan-Aplikasi: Vols. i–viii*.
- R. Wayne Pace dan Don F. Faules, *Komunikasi Organisasi : Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Editor Deddy Mulyana, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 185
- Sahadi, S., Taufiq, O. H., & Wardani, A. K. (2020). Karakter kepemimpinan ideal dalam organisasi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 513–524.
- Saputra, Y. D., & Setiadi, Y. W. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kerjasama Tim dan Komunikasi Terhadap Motivasi Kerja di PT. BSP Cabang Air Muring. (JEMS) *Jurnal Entrepreneur dan Manajemen Sains*, 4(1), 269–279.
- Sasmita, H. (2021). Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Internal Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penghubung Provinsi Riau (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Simanullang, R. N. S., Adimulyo, R. A., Wisesa, S. P., Wardani, S., & Faisal, M. (2022). Efektivitas Badan Penghubung dalam Memfasilitasi Urusan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Kepada Pemerintah Pusat. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 4(1 April), 89–98.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional).
- Taufiq, O. H., Wardani, A. K., & Galuh, U. (2020). Karakter Kepemimpinan Ideal. *Jurnal MODERAT*, Volume 6, Nomor 3, 6, 513–524.
- Waruwu, M. H. (2022). Analisis Peran Kepemimpinan Dalam Mengatasi Konflik Kerja Pegawai. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 368–374.
- Yunitasari, M. (2022). Model Komunikasi KAMMI Daerah Mataram dalam mempertahankan Eksistensi Organisasi. 100.

Internet

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/15/3-provinsi-pengekspor-hasil-minyak-terbesar-pada-2021#:~:text=Riau%20juga%20merupakan%20provinsi%20penghasil,dari%20nilai%20total%20ekspor%20nasional>. Diakses pada 04 Oktober 2023 pukul 17.23
- <https://badanpenghubung.riau.go.id/wp-content/uploads/2023/06/LkjIP.pdf> Diakses pada 05 Oktober 2023 pukul 21.08
- <https://badanpenghubung.riau.go.id/wp-content/uploads/2023/06/LKJIP-2020.pdf> Diakses pada 05 Oktober 2023 pukul 21.16
- <https://badanpenghubung.riau.go.id/wp-content/uploads/2023/06/LKjIP-2021.pdf> Diakses pada 05 Oktober 2023 pukul 21.28
- <https://badanpenghubung.riau.go.id/wp-content/uploads/2023/06/LKjIP-2022.pdf> Diakses pada 05 Oktober 2023 pukul 21.39.